



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MURWATI, S.Sos**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **A BADRUN ISNAENI, S.Sos**

Jabatan : SEK CAMAT KARANGREJA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,



**A BADRUN ISNAENI, S.Sos**

NIP. 19671009 198903 1 006

Pihak Pertama,

**MURWATI, S.Sos**

NIP. 19821117 200901 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Dokumen	5
	- Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKjIP, laporan bulanan dan SIPD)	Dokumen	4
	Tercukupinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100
	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	10
	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	22
	- Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12

No	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp 10.000.000,-	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.000.000,-	APBD
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.000.000,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.506.727.000,-	APBD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.491.667.000,-	APBD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 900.000,-	APBD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 14.160.000,-	APBD

Purbalingga, 2 Januari 2025



Pihak Kedua,

**A. BADRUN ISNAENI, S.Sos**

NIP. 19671009 198903 1 006

Pihak Pertama,

**MURWATI, S.Sos**

NIP. 19821117 200901 2 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUPARNO, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SUPRIYANTI, S.Sos**

Jabatan : CAMAT KARANGREJA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2025



Pihak Kedua,  
**SUPRIYANTI, S.Sos**  
NIP. 19700407 198903 2 001

Pihak Pertama,

**SUPARNO, S.Sos**  
NIP. 19680416 200701 1 031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

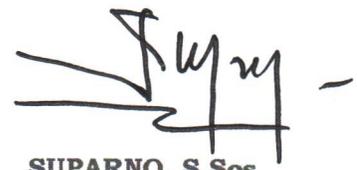
No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya pelayanan publik kecamatan		Nilai evaluasi pelayanan publik	Nilai	3,5
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Persen	100
		- Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan	Persen	100
		- Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	17
	Meningkatnya desa yang melaksanakan tertib administrasi		cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	50
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	cakupan desa yang dibina oleh kecamatan	Persen	100
		- Terfasilitasinya administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	Dokumen	12

			Pemerintahan Desa		
		- Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa (yg ada pilkades)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan penanganan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Laporan	12
		Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan	12
		- Terselenggaranya sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Laporan	12
	Meningkatnya penanganan potensi konflik di wilayah Kecamatan		Persentase potensi konflik yang tertangani	Persen	100
		Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	Laporan	12
		- Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa (cek)	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Orang	350

No	Program, Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 9.144.000,-	APBD
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 8.504.000,-	APBD
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 8.504.000,-	APBD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 640.000,-	APBD
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 640.000,-	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 15.000.000,-	APBD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 14.950.000,-	APBD
	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 14.950.000,-	APBD
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 24.000.000,-	APBD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 24.000.000,-	APBD
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 24.000.000,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 30.000.000,-	APBD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 30.000.000,-	APBD
	- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp 30.000.000,-	APBD

Purbalingga, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,



**SUPARNO, S.Sos**

NIP. 19680416 200701 1 031



**SUPRIYANTI, S.Sos**

NIP. 19700407 198903 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **TITIK DWIARTI**  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SUPRIYANTI, S.Sos**  
Jabatan : CAMAT KARANGREJA  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2025



Pihak Kedua,  
**SUPRIYANTI, S.Sos**  
NIP. 19700407 198903 2 001

Pihak Pertama,

**TITIK DWIARTI**  
NIP. 19670331 199203 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan	Persen	100
	Meningkatnya fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Lembaga Kemasyarakan	7
	- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakan	7

No	Program, Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Rp 5.600.000,-	APBD
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 5.600.000,-	APBD
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 5.600.000,-	APBD

Purbalingga, 2 Januari 2025



Pihak Kedua,

**SUPRIYANTI, S.Sos**

NIP. 19700407 198903 2 001

Pihak Pertama,

**TITIK DWIARTI**

NIP. 19670331 199203 2 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **UNUNG PRATIWI ESTI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Kesra

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SUPRIYANTI, S.Sos**

Jabatan : CAMAT KARANGREJA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

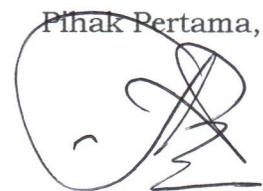
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,  


**SUPRIYANTI, S.Sos**  
NIP. 19700407 198903 2 001

Pihak Pertama,  


**UNUNG PRATIWI ESTI, S.Sos**  
NIP. 19670731 198607 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kasi Kesra

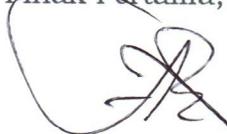
No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan, dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan	Persen	100
		Meningkatnya fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Lembaga Kemasyarakatan	7
		- Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12
2.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan penanganan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Laporan	12
		Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	12
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12

No	Program, Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 20.000.000,-	APBD
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 20.000.000,-	APBD
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan.	Rp 20.000.000,-	APBD
2.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 9.000.000,-	APBD
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 9.000.000,-	APBD
	- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 9.000.000,-	APBD

Purbalingga, 2 Januari 2025



Pihak Kedua,  
**SUPRIYANTI, S.Sos**  
 NIP. 19700407 198903 2 001

Pihak Pertama,  


**UNUNG PRATIWI ESTI, S.Sos**  
 NIP. 19670731 198607 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **WARDOYO, S.Sos**  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **A BADRUN ISNAENI, S.Sos**  
Jabatan : SEK CAMAT KARANGREJA  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2025



Pihak Kedua,  
**A BADRUN ISNAENI, S.Sos**  
NIP. 19671009 198903 1 006

Pihak Pertama,

**WARDOYO, S.Sos**  
NIP. 19710220 200701 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD/persentase pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	Laporan	12
	- Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12
	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum penunjang operasional kantor	Persen	100
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2
	- Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12
	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka	Dokumen	12
	- Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
	- Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6
	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Bulan	12
	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	- Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	2

	- Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	22
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8
	- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan - Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10
	- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3

No (1)	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan (2)	Anggaran (3)	Ket (4)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 1.440.000,-	APBD
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1.440.000,-	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 28.735.000,-	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.056.000,-	APBD
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 15.499.000,-	APBD
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.200.000,-	APBD
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 2.000.000,-	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 3.700.000,-	APBD
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 5.280.000,-	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 83.526.000,-	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 19.530.000,-	APBD

No (1)	Kegiatan dan atau Sub Kegiatan (2)	Anggaran (3)	Ket (4)
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 63.996.000,-	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 25.000.000,-	APBD
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25.000.000,-	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 116.000.000,-	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 79.000.000,-	APBD
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 7.000.000,-	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 30.000.000,-	APBD

Purbalingga, 2 Januari 2025



Pihak Kedua,

**A BADRUN ISNAENI, S.Sos**  
NIP. 19671009 198903 1 006

Pihak Pertama,

**WARDOYO, S.Sos**  
NIP. 19710220 200701 1 008